PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Oleh :
Wanda Fernandes
Pembimbing : Kennedy dan Rheny Afriana Hanif

Faculty Of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : wanda_fernandes_simamora@yahoo.com

The Influence Of Accountability, Transparency and Supervision On The Performance Of Budgeting Of Government in Kampar Regency

ABSTRACT

This study aimed to examine the influence of Accountability, Transparency and Supervision on the Performance of Budgetting of Kampar Government. This study was conducted at SKPD of Kampar Regency. The population in this study were employed who worked in the SKPD Kampar Regency (32 government agencies). The sampling method used in this study is purposive sampling method. The respondent in this study is the head of SKPD/ the head of financial, and PPK SKPD. The data used in this study were 60 data. The hypotheses then tested is multiple linear regression analysis by using SPSS version 20.0. The result of this study indicated that the Accountability, the Transparency and The Supervision has significantly effect on effectiveness of the Performance Budgeting. The magnitude of the effect (R^2) the Accountability, the Transparency and Supervision on the effectiveness of the Performance Budgeting area was 23%. While the remaining 77% is influenced by other independent variabel that are not observed in this study.

Keywords : Accountability, Transparency, Supervision, Performance, and Budgeting.

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Kabupaten/Kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan system pengawasan yang mendasar dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, memberi arti penting bagi proses reformasi lembaga sektor publik di Indonesia. Kedua UU tersebut memberi dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam rangka menciptakan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel (Indra Bastian 2006). Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Warga negara yang semakin cerdas dan kritis

selalu menuntut untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan (Arjenim 2012).

Untuk menghadapi tuntutan perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses peyusunan anggaran. Penganggaran berbasis kinerja atau *performance budgeting* merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang berorientasi pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai (Andriani 2012)

Ekonomi berhubungan dengan biaya pengadaan (*cost of inputs*) maka, ekonomi adalah praktek pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan, mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. berikutnya Efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya dengan keluaran yang dihasilkan. Kegiatan dikatakan efisiensi apabila *output* tertentu dapat dicapai sumber daya seminimal mungkin. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannnya. Efektifitas menggambarkan kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan pengukuran kinerja dengan konsep *value for money* yaitu untuk mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan hasil yang optimal serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Dalam pencapaian tujuan organisasi selain value for money ada juga akuntabilitas. Kemudian akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga atas segala tindakan yang ditunjukan kepada yang memberi wewenang. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah *(agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjwabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi, Turner & Hulme (1997) dalam Mardiasmo (2002:58). Fenomena KKN yang belakangan ini terjadi dapat menjadi indikator dari rendahnya Akuntabilitas Pemerintah Kota/Kabupaten yang merupakan menjadi salah satu ciri yang penting dalam tata pemerintahan yang baik

Selain itu tuntutan sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan informasi terhadap masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak public dalam halnya pengelolaan anggaran. Transparansi dapat diartikan memberikan informasi yang terbuka, yang sesuai da jujur kepada public sesuai dengan perundang-undangan.

Tercapainya suatu pengelolaan anggaran yang baik tidak terlepas dari adanya pengawasan yang dilakukan

oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri (pengawasan melekat). Selain dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri, pengawasan juga dilakukan oleh legislatif dan lembaga pengawas khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Pengawasan terhadap anggaran diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Menurut Mardiasmo (2002:126) kinerja anggaran daerah pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling terkait dan terintegrasi. Ketiga elemen tersebut adalah (1) Masyarakat, (2) DPRD, (3) Pemerintah Daerah. transparansi kebijakan publik dalam daerah berfungsi sebagai penghubung yang menghubungkan antara kinerja tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Achmadi,dkk (200:11) dalam Anugriani (2013) menyatakan bahwa kontrol masyarakat yang kuat akan di sertai ruang partisipasi publik yang luas dapat menjaga proses penganggaran dan kebijakan menjadi lebih bertanggungjawab dan tepat sasaran. Paling tidak ada tiga parameter standar yang harus diterima secara langusng oleh berbagai kalangan yang seharusnya dipenuhi oleh sebuah kinerja anggaran atau pengelolaan anggaran yang baik, yaitu Pengawasan, Transparan dan Akuntabel. APBD sebagai salah satu produk kebijakan keuangan publik seharusnya mengakomodir beberapa indikator yang sesungguhnya merupakan penjabaran dari tiga parameter utama yang pada intinya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Isu pokok yang muncul adalah buruknya kinerja pengelolaan anggaran daerah. Kenyataan tersebut secara gamblang bisa kita ketahui dari makin sedikitnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti halnya pada periode 2013-2014 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Kampar tahun 2014. Hal ini sama dengan Opini yang diberikan pada tahun-tahun sebelumnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rezki Mulia Anugriani (2013) tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran pada instansi pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Lokasi dan waktu penelitian.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya :1) apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada instansi pemerintah kabupaten Kampar ? 2) apakah Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada instansi pemerintah kabupaten Kampar ? 3) apakah Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada instansi pemerintah kabupaten Kampar ?

Adapun tujuan penelitian adalah : 1) untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran 2) untuk membuktikan secara empiris pengaruh Transparansi terhadap kinerja anggaran 3) untuk membuktikan

secara empiris pengaruh Pengawasan terhadap kinerja anggaran.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kinerja Anggaran

menurut Nordiawan (2006:48) dalam Anugriani (2013), "anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial." Jadi pengertian anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran financial

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Pengawasan

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilkukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksanaan.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran

Secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Pada pengelolaan anggaran perlu adanya akuntabilitas, dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik di pusat maupun di daerah (Mahmud.F.A 2013) selain itu tuntutan akuntabilitas sektor publik

terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik dalam halnya pengelolaan anggaran.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

H_1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran

kebijakan dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, oleh karena itu semakin transparan kebijakan itu sendiri maka akses informasi dapat dengan mudah diketahui oleh publik.

Transparansi (Liper 2011) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

H_2 : Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran

untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik di perlukan partisipasi kepada instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Oleh karena itu Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pemerintah daerah merupakan hak sebagai kedaulatan rakyat, dengan demikian adanya partisipasi masyarakat tentunya akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan.

Pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan didalam penganggaran, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

H_3 : Pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kampar. Adapun tekhnik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling. Purposive sampling* adalah tekhnik pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti bahwa sampel adalah pihak yang paling baik dijadikan sampel penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran/Barang, Kasubag. Keuangan, dan Pejabat Pembuat Komitmen. (Sekaran 2011)

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa Kepala SKPD, Kasubag/Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pihak yang terkait langsung dalam penganggaran. Responden dalam penelitian ini berjumlah 64 orang dari

32 SKPD yang masing-masing SKPD ada 2 responden.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer kepada pegawai yang terkait dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analsisis regresi berganda dan koefisisen determinasi dengan menggunakan bantuan SPSS versi 20.0.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Anggaran. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas, Equity, Equality.

Kinerja Anggaran diukur dengan menggunankan 9 item pernyataan yang mengacu pada Anugriani (2013).

Variabel Independen

Penelitian menggunakan tiga variabel independen yaitu :

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas diukur dengan menggunakan 9 pernyataan yang mengacu pada Anugriani (2013). Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Akuntabilitas adalah Penyajian, Penilaian, Pelaksanaan dan Pertimbangan.

b. Transparansi

Transparansi diukur dengan menggunakan 9 item pernyataan yang diadopsi dari Anugriani (2013).

c. Pengawasan

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengawasan adalah Perencanaan dan Penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pertanggung jawaban dan tujuan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Dalam rangka keperluan penelitian, pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kampar. Dengan mengambil masing-masing 2 responden pada setiap SKPD yaitu Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran,/Kasubag SKPD dan Pejabat Pembuat Komitmen.

Kuesioner dikirim sebanyak 64 kuesioner dan yang kembali sebanyak 60 kuesioner (94%). Kuesioner yang tidak lengkap sebanyak 4 kuesioner (6%). Sehingga kuesioner yang dapat digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah 60 kuesioner (94%).

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran tentang ringkasan data dari masing-masing variabel yang akan masuk dalam proses pengujian yang bertujuan untuk mempermudah memahami data. Statistik deskriptif ini menggambarkan tentang Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan. Statistik disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi

yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Akuntbilitas	60	36.0667	4.46024
Transparansi	60	36.8500	3.87003
Pengawasan	60	36.3000	3.98003
Kinerja Anggaran	60	37.7167	3.17347
Valid N (listwise)	60		

Sumber: Data olahan SPSS 20,2015

Nilai rata-rata keempat variabel tersebut lebih besar daripada nilai standar deviasinya, sehingga ini menunjukkan bahwa penyebaran data sudah baik.

Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Di mana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 36 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n – 2 dengan alpha 0,05, n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini df = n-2 (60-2) = 58, sehingga didapat r tabel untuk df (58) = 0,254. Berdasarkan hasil uji validitas dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan valid, hal ini terlihat dari nilai rhitung seluruh indikator variabel lebih besar dari r_{tabel} n 60, α5% = 0,254

Hasil Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dilakukan secara statistik sama seperti halnya pengujian validitas data. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung *Cronbac'h Alpha* dengan bantuan SPSS 20 *for windows*. Jika nilai hitung *cronbac'h alpha* besar dari 0,60 maka instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel (handal).

Berdasarkan hasil uji reliabiltias diketahui bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai *Cronbac'h Alpha* seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0,60.

Hasil Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini, Uji normalitas data dapat dilihat dari grafik *P-P Plot*. Jika data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2011:161). Hasil pengujian normalitas data dengan *P-P Plot* untuk variabel dependen (Y) efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1
Normal P-P Plot Regresion Standardized Residual

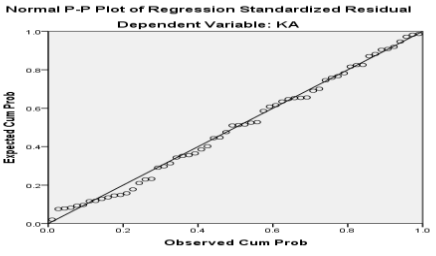

Sumber: Data olahan SPSS 20,2015

Dari grafik *P-P Plot* dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas Data

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Suatu variabel dikatakan terbebas dari penyimpangan multikolinieritas,

Tabel 2
Nilai Tolerance dan VIF

Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Akuntabilitas	0,795	1,317
Transparansi	0,968	1,033
Pengawasan	0,780	1,283

Sumber: Data olahan SPSS 20,2015

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa ketiga variabel ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat *(ZPRED)* dengan residual *(SRESID)*. Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139) Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 2 berikut:

Gambar 2
Scatterplot

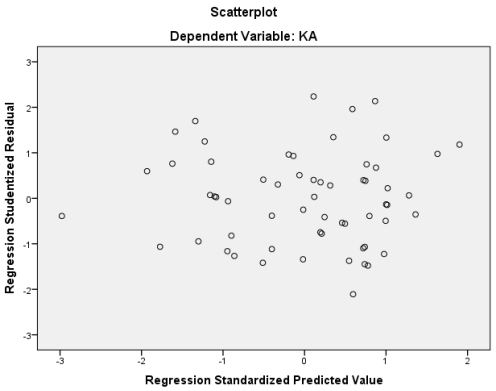

Sumber: Data olahan SPSS 20,2015

Dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta penyebarannya terletak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Berikut hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini :

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.519[a]	.270	.230	2.78398

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Pengawasan, Transparansi
b. Dependent Variable: Kinerja Anggaran

Sumber: Data olahan SPSS 20, 2015

Berdasarkan tabel diatas, Diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,230. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 23 %.

Sedangkan sisanya 77 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitisn ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	14.745	5.309	
	Akuntabilitas (X1)	.200	.093	.281
	Transparansi (X2)	.209	.095	.260
	Pengawasan (X3)	.168	.076	.202

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran (Y)

Sumber: Data olahan SPSS 20,2015

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + e$$

$Y = 14{,}745 + 0{,}200X_1 + 0{,}209X_2 + 0{,}222X_3 + e$

Keterangan:
XI: Akuntabilitas
X2: Transparansi
X3: Pengawasan

Hasil pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas /independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Uji t dilakukan pada signifikan 5% (α = 0,05), maka t tabel dapat diketahui sebagai berikut:

t_{tabel} = n-k-1 ; α/2
= 60-3-1 ; 0,05/2
= 56 ; 0,025
t_{tabel} = 2,003

Hasil pengujian hipotesisis secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t)

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta		
1	(Constant)		2.778	.007
	Akutabilitas (X1)	.281	2.142	.037
	Kompetensi Transparansi (X2)	.255	2.194	.032
	Pengawasan (X3)	.279	2.156	.035

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran (Y)

Sumber: Data olahan SPSS 20,2015

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran

Untuk melihat pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja anggaran digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan sig.t < α = 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan sig.t > α = 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dari Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,142 > 2,003 dan sig.t (0,037) < 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan **H_1 diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

Seseorang yang memiliki Akuntabilitas yang tinggi pada organisasi akan menimbulkan kinerja organisasi yang tinggi,tingkat absensi berkurang, dan meningkatnya loyalitas karyawan pada organisasi. Secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Pada pengelolaan anggaran perlu adanya akuntabilitas, dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik di pusat maupun di daerah, selain itu tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik dalam halnya pengelolaan anggaran. Selain itu dengan adanya Akuntabilitas yang kuat, mereka juga akan bekerja dengan keras dan ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya yang nantinya akan berujung pada meningkatnya kinerja dan tercapainya tujuan organisasi.

Hasil Penelitian ini didukung oleh Penelitian yang pernah diteliti oleh Isa dan Sopanah (2004) dan Anugriani (2013) yang mengemukakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran

Untuk melihat pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan sig.t < α = 0,05, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan sig.t > α = 0,05, maka H_0 diterima dan H_1ditolak.

Dari Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,194 > 2,003 dan sig.t (0,032) < 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan **H_2 diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

kebijakan dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, oleh karena itu semakin transparan kebijakan itu sendiri maka akses informasi dapat dengan mudah diketahui oleh publik

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Hasil Penelitian ini didukung oleh Penelitian yang pernah diteliti oleh Isa dan Sopanah (2004), akmal (2007) dan Anugriani (2013) yang mengemukakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran

Pengaruh pengawasan terhadap Kinerja Anggaran

Untuk melihat pengaruh Pengawasan terhadap kinerja anggaran digunakan uji statistik t. Uji

statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan sig.t < α = 0,05, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan sig.t > α = 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dari Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,156 > 2,003 dan sig.t (0,035) < 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan **H_3 diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik di perlukan partisipasi kepada instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Oleh karena itu Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pemerintah daerah merupakan hak sebagai kedaulatan rakyat, dengan demikian adanya partisipasi masyarakat tentunya akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan.

Pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan didalam penganggaran, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal.

Hasil Penelitian ini didukung oleh Penelitian yang pernah diteliti oleh Anugriani (2013) yang mengemukakan bahwa Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran SKPD Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Akuntabilitas (X_1) mempengaruhi variabel kinerja anggaran (Y). Hal ini menunjukkan Akuntabilitas yang tinggi sangat menunjang kinerja anggaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Variabel Transparasi (X_2) mempengaruhi variable kinerja anggaran (Y). Hal ini menunjukkan jika Transparansi tinggi maka kinerja anggaran yang dihasilkan juga dapat baik sehingga dapat meningkatkan kinerja di dalam instansi tersebut.
3. Variabel Pengawasan (X_3) mempengaruhi variabel kinerja anggaran (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa Pengawasan dalam setiap SKPD membantu unit-unit kerja untuk memperhatikan kinerja anggaran yang baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Kampar, sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian yang lebih luas.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi akademisi yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi kinerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk dapat meningkatkan penerapan sistem Kinerja Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Kampar agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A.Andriani , 2012. *Implementasi strategi penganggaran berbasis kinerja pada universitas hasanuddin*. Universitas Hasanuddin : Makassar

Akmal , 2007. *Pengaruh partisipasi masyarakt dan transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah*. Padang: UNPAD

Anugriani M.R, 2013. *Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money pada Pemerintahan Kabupaten Bone*.Gorontalo: Universitas Hasanuddin

Arjenim, 2012. *Penerapan konsep good governance*, http://arjaenim.blogspot.com/2012/11/penerapan-konsep-good-governance-di.html

Bastian, Indra 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

FA.Mahmud, 2013. *Pengaruh Value For Money terhadap Akuntabilitas Publik*:Gorontalo

Gozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20. Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Keputusan Presiden No. 74 Pasal 16 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah

Liper Siregar, 2011. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi*

Pemerintahan sebagai variable moderator pada pemerintah kota pematang siantar. Medan : Universitas Sumatera Utara

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta: Andi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Sekaran , Uma. 2011. *Research Methods For Business Metodologi Penelitian Untuk Bisnis buku 2 edisi 4* , Salemba Empat, Jakarta.

Sopanah, isa, 2010. *Pengaruh akuntabilitas public, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah*: Universitas Widya Gema Malang